

Analisis Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Pada Satuan Pendidikan Dasar

Abdul Sukur¹, Asep Somala², Nurhasan³, Elda Puspitasari⁴

^{1,2,3,4}STKIP Arrahmaniyah Depok
sukurabdul8@gmail.com¹

Abstract

This study aims to analyze the Pancasila and Civic Education (PPKn) curriculum in elementary schools, focusing on its relevance, implementation, and learning challenges. The research method used is a literature study, reviewing curriculum documents, government regulations, and previous studies. The results show that the PPKn curriculum in elementary schools is in line with the objectives of forming the Pancasila Student Profile, but its implementation in the field still faces obstacles, particularly related to limited learning media, conventional teaching methods, and teachers' competence in developing innovative learning models. This study recommends the need to improve teacher professionalism, learning facilities, and collaboration between schools, families, and communities.

Keywords:

*Curriculum,
Pancasila and Civic Education,
Primary Education,
Elementary School*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada satuan pendidikan dasar dengan fokus pada relevansi, implementasi, dan tantangan pembelajaran. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah dokumen kurikulum, regulasi pemerintah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum PPKn pada sekolah dasar telah selaras dengan tujuan pembentukan Profil Pelajar Pancasila, namun implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan media pembelajaran, metode pengajaran yang masih konvensional, serta kompetensi guru dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya peningkatan profesionalisme guru, dukungan sarana pembelajaran, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Corresponding Author:

Abdul Sukur
STKIP Arrahmaniyah Depok
Email: sukurabdul8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam membangun peradaban bangsa yang bermartabat dan berkarakter (Nugraha, Derry, Joko, 2023). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Rachmadio et al., 2024). Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis sebagai wahana pembentukan karakter dan identitas kebangsaan peserta didik sejak usia dini (Ginanjari, 2024).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan sekadar mata pelajaran yang mengajarkan pengetahuan kognitif tentang ideologi negara, melainkan merupakan proses pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia (Ginanjari & Purnama, 2023). Ginanjari (2024) menegaskan bahwa PPKn bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang demokratis,

berkarakter, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi (Ginanjari et al., 2024). Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, keberadaan PPKn menjadi semakin krusial sebagai benteng pertahanan nilai-nilai luhur bangsa di tengah arus modernisasi yang tidak jarang mengikis identitas nasional (Basit et al., 2023).

Pada jenjang pendidikan dasar, PPKn memiliki peran yang sangat vital karena masa ini merupakan periode emas pembentukan karakter anak (Lenny Lenny, 2024). Usia sekolah dasar adalah fase di mana nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara mulai ditanamkan dan diinternalisasi dalam diri peserta didik. Kurikulum PPKn di tingkat pendidikan dasar dirancang untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila, pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme (Pratama et al., 2023). Melalui pembelajaran PPKn, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami konsep-konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, berbagai evaluasi dan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum PPKn di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Sila dkk. (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa pembelajaran PPKn sering kali masih bersifat kognitif semata dengan dominasi metode ceramah yang monoton (Sila & Dwijendra, 2024). Kondisi ini menyebabkan aspek afektif dan psikomotor yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pendidikan karakter belum terinternalisasi secara optimal dalam diri peserta didik (Siti Muntamah & Fardana N, 2024). Pembelajaran yang terlalu teoretis dan kurang kontekstual membuat siswa kesulitan menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembaruan kurikulum untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satu terobosan penting adalah implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada siswa, dan mendorong pengembangan kompetensi secara holistik (Abdul Fattah Nasution et al., 2023). Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta konteks lokal masing-masing satuan pendidikan (Jannah et al., 2022). Perubahan paradigma ini tentu membawa implikasi langsung terhadap desain kurikulum, pemilihan materi pembelajaran, strategi pedagogis, serta sistem evaluasi dalam mata pelajaran PPKn di sekolah dasar (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022).

Transformasi kurikulum ini juga sejalan dengan upaya pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang menjadi visi pendidikan Indonesia (Yunita et al., 2020). Profil Pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik Indonesia, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif (Vhalery et al., 2022). PPKn sebagai mata pelajaran yang secara eksplisit mengajarkan nilai-nilai Pancasila menjadi ujung tombak dalam mewujudkan profil tersebut.

Meskipun telah terjadi berbagai pembaruan kurikulum, pertanyaan fundamental yang perlu dijawab adalah sejauh mana kesesuaian antara kurikulum PPKn yang dirancang dengan kebutuhan aktual peserta didik dan tuntutan zaman. Apakah kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum sudah relevan dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor anak usia sekolah dasar. Bagaimana guru menerjemahkan dokumen kurikulum menjadi praktik pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kurikulum, baik dari aspek kompetensi pendidik, ketersediaan sarana prasarana, dukungan kebijakan, maupun partisipasi masyarakat.

Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut adanya kajian mendalam dan komprehensif terhadap kurikulum PPKn pada satuan pendidikan dasar. Analisis tidak hanya perlu dilakukan terhadap dokumen kurikulum sebagai *grand design*, tetapi juga terhadap proses implementasi di lapangan beserta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Melalui analisis yang sistematis, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum yang ada, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan kurikulum agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan yang substantif dan transformatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan kurikulum PPKn yang lebih berkualitas dan berdampak nyata terhadap pembentukan karakter generasi muda Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada satuan pendidikan dasar secara mendalam melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan (Amelia et al., 2023). Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah komprehensif terhadap dokumen-dokumen resmi, regulasi pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur teoretis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Derry Nugraha, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sekunder (Derry; Nugraha, 2024). Sumber data primer meliputi dokumen kurikulum nasional yang mencakup Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar. Dokumen-dokumen ini meliputi struktur kurikulum, kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, serta panduan implementasi pembelajaran PPKn. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan regulasi pemerintah yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan, terutama Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang implementasi kurikulum di satuan pendidikan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, baik yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prosiding seminar, buku-buku teks, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, kurikulum pendidikan dasar, dan implementasi pembelajaran PPKn. Penelitian-penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai rujukan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Proses dokumentasi dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, dimulai dari identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, kemudian melakukan inventarisasi terhadap dokumen-dokumen tersebut, dan selanjutnya melakukan pengkajian mendalam terhadap isi dokumen. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan kategorisasi data berdasarkan aspek-aspek yang menjadi fokus analisis, yaitu tujuan kurikulum, kompetensi yang dirumuskan, pendekatan dan metode pembelajaran, serta tantangan implementasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi. Analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat di replikasi dan valid dari data dengan memperhatikan konteksnya. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkodifikasi, dan mengategorisasi pola-pola utama yang terdapat dalam dokumen kurikulum PPKn. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari berbagai sumber. Kedua, penyajian data, yaitu penyusunan informasi secara sistematis yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Ketiga, verifikasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.

Fokus analisis dalam penelitian ini meliputi lima aspek utama. Pertama, menganalisis kesesuaian tujuan kurikulum PPKn dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Pancasila. Kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran PPKn serta relevansinya dengan tahap perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. Ketiga, mengevaluasi implementasi kurikulum PPKn dalam proses pembelajaran, termasuk pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan. Keempat, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum. Kelima, merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum PPKn agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* dengan cara mendiskusikan temuan-temuan penelitian dengan para ahli di bidang pendidikan kewarganegaraan untuk memperoleh masukan dan validasi terhadap interpretasi data yang dilakukan.

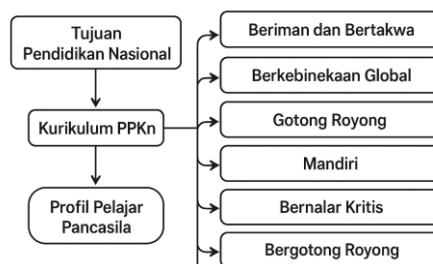
3. PEMBAHASAN

a. Kesesuaian Kurikulum PPKn dengan Tujuan Pendidikan Nasional

Hasil analisis terhadap dokumen kurikulum menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada satuan pendidikan dasar telah dirancang dengan baik dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kurikulum PPKn secara eksplisit merumuskan tujuan pembentukan karakter kebangsaan, pengembangan kompetensi kewarganegaraan, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik. Struktur kurikulum yang ada telah mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor secara komprehensif, meskipun dalam praktiknya implementasi terhadap ketiga dimensi tersebut masih belum merata.

Kurikulum PPKn di sekolah dasar dirancang untuk mencapai pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang menjadi visi pendidikan Indonesia saat ini. Enam dimensi Profil Pelajar Pancasila—beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif—terintegrasi dalam capaian pembelajaran PPKn. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara kebijakan makro pendidikan nasional dengan desain kurikulum PPKn di tingkat operasional. Integrasi nilai-

nilai Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai pengetahuan teoretis, tetapi juga dirancang untuk diimplementasikan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna.



Gambar 1. Mindmap Keterkaitan Kurikulum PPKn dengan Tujuan Pendidikan Nasional dan Profil Pelajar Pancasila

b. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum PPKn

Analisis terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum PPKn menunjukkan bahwa rumusan kompetensi telah disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif, sosial, dan moral peserta didik usia sekolah dasar. Kompetensi-kompetensi yang dirumuskan mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila, norma-norma kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pemahaman tentang simbol-simbol dan identitas nasional. Kompetensi-kompetensi ini dirancang secara progresif dari kelas rendah hingga kelas tinggi dengan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat.

Dalam Kurikulum 2013, kompetensi inti PPKn mencakup empat aspek, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara dalam Kurikulum Merdeka, kompetensi dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran yang lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Relevansi kompetensi dengan kebutuhan peserta didik dapat dilihat dari fokusnya pada pengembangan karakter, pembiasaan perilaku positif, dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Implementasi Kurikulum PPKn dalam Pembelajaran

Meskipun secara konseptual kurikulum PPKn telah dirancang dengan baik, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ita (2023) yang menyatakan bahwa pembelajaran PPKn lebih banyak berfokus pada aspek kognitif, sementara internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam aspek afektif dan psikomotor masih kurang terwujud (Ita Puspa sari, 2022). Dominasi metode pembelajaran konvensional, terutama ceramah dan tanya jawab, masih sangat kental dalam praktik pembelajaran PPKn di kelas (Ramadhan et al., 2024). Metode-metode tersebut cenderung menempatkan siswa sebagai objek pasif yang menerima informasi, bukan sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuan dan nilai-nilainya sendiri.

Keterbatasan media pembelajaran menjadi salah satu hambatan signifikan dalam implementasi kurikulum. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki akses terhadap media pembelajaran yang memadai untuk mendukung pembelajaran PPKn yang lebih interaktif dan menarik. Padahal, karakteristik peserta didik usia sekolah dasar memerlukan pendekatan pembelajaran yang konkret, menyenangkan, dan melibatkan berbagai indra. Penggunaan media pembelajaran yang variatif seperti video, gambar, permainan edukatif, atau simulasi dapat meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap materi PPKn (Sulistianingsih et al., 2024).

Kompetensi guru dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif juga menjadi tantangan tersendiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua guru PPKn di tingkat pendidikan dasar memiliki pemahaman yang memadai tentang strategi pembelajaran aktif, kontekstual, dan bermakna. Banyak guru yang masih menggunakan pendekatan tradisional karena keterbatasan pengetahuan tentang metode-metode pembelajaran modern, atau karena merasa lebih nyaman dengan cara mengajar yang sudah biasa dilakukan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan atau pengembangan profesional yang fokus pada inovasi pembelajaran PPKn.



Gambar 2. Implementasi Kurikulum PPKN

d. Strategi Pengembangan Pembelajaran PPKn

Berdasarkan hasil analisis, beberapa strategi dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PPKn di sekolah dasar. Pertama, penerapan *Project Based Learning* (PjBL) dalam pembelajaran PPKn dapat menjadi alternatif yang efektif. Melalui PjBL, siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep kewarganegaraan secara teoretis, tetapi juga menerapkannya dalam proyek-proyek nyata yang kontekstual dengan lingkungan mereka (Zainudin Agus et al., 2025). Misalnya, proyek tentang pelestarian lingkungan, bakti sosial, atau kampanye nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kedua, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat memperkuat internalisasi nilai dalam diri peserta didik. Kegiatan pramuka, paskibra, PMR, atau organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dapat menjadi wadah praktik langsung nilai-nilai demokrasi, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa belajar bukan hanya dari buku teks, tetapi dari pengalaman langsung yang lebih bermakna dan berkesan. Ketiga, optimalisasi kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam pendidikan karakter melalui PPKn. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah perlu mendapat penguatan melalui pembiasaan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kolaborasi tripusat pendidikan ini dapat diwujudkan melalui program-program seperti *parenting education*, kelas orang tua, atau kegiatan sosial bersama yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.



Gambar 3. Strategi Pengembangan Pembelajaran PPKN.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada satuan pendidikan dasar, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual kurikulum PPKn telah dirancang dengan baik dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional serta visi pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar telah disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik usia sekolah dasar dan relevan dengan kebutuhan pembentukan karakter kebangsaan. Namun demikian, implementasi kurikulum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi dominasi metode pembelajaran konvensional yang kurang melibatkan siswa secara aktif, keterbatasan media pembelajaran yang memadai, serta kompetensi guru yang belum optimal dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif dan kontekstual. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran PPKn cenderung bersifat kognitif semata, sementara internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam dimensi afektif dan psikomotor belum terwujud secara maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya komprehensif dan terintegratif dari berbagai pihak.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan profesionalisme guru melalui program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan tentang strategi pembelajaran inovatif, penyediaan sarana dan media pembelajaran yang memadai dan kontekstual, penerapan model pembelajaran aktif seperti *Project Based Learning*, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta optimalisasi kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pembiasaan nilai-nilai kewarganegaraan. Selain itu, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi kurikulum berjalan efektif dan dapat terus disempurnakan berdasarkan umpan balik dari lapangan, sehingga tujuan pendidikan kewarganegaraan yang substantif dan transformatif dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Abdul Fattah Nasution, Setia Ningsih, Mona Febrica Silva, Leli Suharti, & Jekson Parulian Harahap. (2023). Konsep Dan Implementasi Kurikulum Merdeka. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(3), 201–211. <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i3.37>
- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Basit, A., Sapriya, S., Komalasari, K., & Rahmat, R. (2023). Implementasi Model Project Based Learning Dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 10(2), 216–223. <https://doi.org/10.36706/jbti.v10i2.20870>
- Ginanjari, D. (2024). The Effect of Online Learning on Student Achievement in Elementary Schools in Indonesia 1*. *Eastasouth Proceeding of Humanities and Social Sciences (EPHSS)*, 43–52. <https://asj.eastasouth-institute.com/index.php/ephss43>
- Ginanjari, D., Firman, M., Sunandi, I., Purnama, W. W., & Maharani, N. (2024). Evolusi Pendidikan Kewarganegaraan: dari Pendekatan Berbasis Pengetahuan ke Perspektif yang Lebih Luas. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(4), 57–64. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3263>
- Ginanjari, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122–132. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>
- Ita Puspa sari, H. (2022). Aplikasi Strategi Project Based Learning (PjBL) dalam Pembelajaran Al-Qur'an Hadits Untuk Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Siswa MI As-Shibyan Gresik. *Tarbawiyat*, 1(01), 37–52. <https://doi.org/10.62589/t.v1i01.46>
- Jannah, F., Irtifa, T., & Fatimatus Az Zahra, P. (2022). Problematika penerapan kurikulum Merdeka Belajar 2022. *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan*, 4(2), 55–65.
- Leny Leny. (2024). Mengembangkan Karakter Peserta Didik yang sesuai Profil Pelajar Pancasila melalui Implementasi Kurikulum Merdeka. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 3(1), 343–350. <https://doi.org/10.55606/lencana.v3i1.4585>
- Nugraha, Derry, Joko, F. S. (2023). *PENGARUH KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER/UKM DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA*. 4(1), 1–8.
- Nugraha, Derry; (2024). *METODOLOGI PENELITIAN MANAJEMEN DAN BISNIS*.
- Nugraha, Derry. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN : TEORI DAN PRAKTIK* (N. Mayasari (ed.)). Penerbit Widina Media Utama.
- Pratama, D. A., Ginanjari, D., & Solehah, L. S. (2023). Penerapan Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari - Hari Sebagai Pendidikan Karakter Di Mts. Darul Ahkam Sukabumi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(02), 78–86. <https://doi.org/10.58812/spp.v1i02.114>
- Rachmadio, E., Joko, Lastriyani, I., & Nugraha, D. (2024). School Principal Leadership and Sustainable Governance: A Systematic Review of International Practices. *Eduscape : Journal of Education Insight*, 2(4), 186–194.
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174–7187. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431>
- Ramadhan, I., Mahastuti, C., Erianda, A. O., & Marwan, M. (2024). Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Perancang Pembelajaran Antikorupsi. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 37–47. <https://journal1.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/view/901/629>
- Sila, I. M., & Dwijendra, U. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14.
- Siti Muntamah, B., & Fardana N, N. A. (2024). Menumbuhkan Kreativitas Dengan Model Pembelajaran: Tinjauan Pustaka. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 14(01), 46–58. <https://doi.org/10.24246/j.js.2024.v14.i01.p46-58>

- Sulistianingsih, S., Ajung, A., Alkani, S., & Kasih, R. (2024). Strategi Penguatan Karakter Demokratis Melalui Pembelajaran PPKn Berbasis Proyek. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 821–834. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2055>
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>
- Yunita, Ahmad Zainuri, Ibrahim, Zulfi, A., & Mulyadi. (2020). Implementasi kurikulum merdeka belajar. *Jambura Journal of Educational Management*, 13(2), 66–69. <https://doi.org/10.35335/lebah.v13i2.63>
- Zainudin Agus, Mashudin, Mundir, & Sahlan. (2025). *Model Pembelajaran Project Based Learning (Pjbl) Dalam Membentuk Sikap Sosial Siswa Di Sdn 03 Kemuninglor Jember*. 10(1), 2025. <https://doi.org/10.22373/p->